

PARADIGMA KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA DALAM PANCASILA

Dia'ul istiqomah¹✉, Institut Agama Islam Hamzanwadi NW Lombok Timur

✉ istiqomahdiaul@gmail.com

Vol. 1, No. 2 (2024) Oktober

Abstrak. Pancasila merupakan ideologi yang menjadi fondasi dalam menjaga dan menghidupi keberagaman dan pluralitas di Indonesia. Selain itu, Pancasila juga berfungsi sebagai dasar negara serta pandangan hidup bangsa yang memandu pelaksanaan pemerintahan Indonesia. Dalam konteks keberagaman suku, bangsa, budaya, dan agama yang dimiliki Indonesia, Pancasila menjadi perekat yang menyatukan bangsa ini dalam persatuan yang kuat, sesuai dengan semboyannya "Bhinneka Tunggal Ika". Pancasila menjamin persatuan di tengah keberagaman budaya. Sebagai paradigma, Pancasila berperan sebagai sistem nilai dan kerangka berpikir yang menjadi landasan, metode, sekaligus arah tujuan. Dalam hal ini, Pancasila menjadi pedoman dalam perilaku sehari-hari masyarakat. Segala tindakan dan sikap masyarakat Indonesia harus mencerminkan nilai-nilai dari kelima sila Pancasila demi menciptakan masa depan yang lebih baik. Sebagai ideologi dasar, Pancasila memegang peran penting dalam memperkuat ikatan sosial di Indonesia. Dengan mengakui dan menghargai perbedaan, Pancasila membuka ruang dialog dan pemahaman antar kelompok yang berbeda. Nilai-nilai Pancasila juga mendukung demokrasi dan keadilan sosial, menjadikannya relevan di era global saat ini. Pendidikan Pancasila diharapkan dapat membentuk karakter bangsa yang mengedepankan toleransi dan rasa saling menghormati. Oleh karena itu, Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga menjadi sumber inspirasi dalam menghadapi tantangan zaman. Melalui semangat Pancasila, masyarakat dapat bersatu dalam mencapai tujuan bersama untuk Indonesia yang lebih makmur.

Kata Kunci: *Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, Bernegara, Pancasila.*

Abstract. Pancasila is an ideology that serves as the foundation for preserving and nurturing the diversity and pluralism in Indonesia. In addition, Pancasila functions as the state foundation and the national worldview that guides the implementation of governance in Indonesia. In the context of Indonesia's diversity in ethnicity, nation, culture, and religion, Pancasila acts as a unifying force, binding the country into a strong unity, in line with its motto, "Bhinneka Tunggal Ika" (Unity in Diversity). Pancasila ensures unity amidst cultural diversity. As a paradigm, Pancasila serves as a system of values and a framework of thought that provides the foundation, method, and direction. In this sense, Pancasila becomes a guide for the daily behavior of the people. All actions and attitudes of the Indonesian people must reflect the values of the five principles of Pancasila to create a better future. As the foundational ideology, Pancasila plays a crucial role in strengthening social bonds in Indonesia. By recognizing and respecting differences, Pancasila creates space for dialogue and understanding between various groups. The values of Pancasila also support democracy and social justice, making it relevant in today's global era. Education on Pancasila is expected to shape the national character, promoting tolerance and mutual respect. Therefore, Pancasila is not only the foundation of the state but also a source of inspiration in addressing contemporary challenges. Through the spirit of Pancasila, society can unite in achieving a common goal for a more prosperous Indonesia.

Keywords: *Community Life, Nation, State, Pancasila.*

PENDAHULUAN

Pancasila sebagai fondasi negara Indonesia, dibentuk berdasarkan proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 dan diatur dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945. Pancasila berperan sebagai panduan hidup dan dasar bernegara yang mengutamakan kepentingan bangsa. Sebagai paradigma, Pancasila berfungsi sebagai kerangka berpikir yang terstruktur dan menjadi acuan dalam perilaku sehari-hari serta dalam pembangunan nasional. Setiap tindakan masyarakat Indonesia harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, Pancasila yang bersifat dinamis juga bertujuan untuk membangun kehidupan yang lebih baik di masa depan.

Pancasila berperan sebagai dasar negara dan ideologi yang membentuk sistem nilai, pola pikir, serta pedoman perilaku bagi masyarakat Indonesia. Sebagai suatu paradigma, Pancasila berfungsi untuk menyelaraskan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan nilai-nilai luhur bangsa. Pancasila menjadi fondasi utama dalam pembangunan negara, mencerminkan perjuangan dan pemikiran para pendiri

bangsa. Di tengah perkembangan ilmu pengetahuan dan dinamika sosial, Pancasila tetap memiliki relevansi sebagai pedoman untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi generasi yang akan datang.

Walaupun Pancasila telah ditetapkan sebagai dasar negara dan pedoman hidup bangsa, masih ada kesenjangan dalam pemahaman dan penerapannya di kalangan masyarakat. Banyak orang melihat Pancasila sebagai konsep normatif, tetapi implementasinya dalam kehidupan sehari-hari belum sepenuhnya konsisten. Situasi ini berkaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan dinamika sosial yang terus berubah, yang dapat menimbulkan tantangan dalam mempertahankan relevansi Pancasila sebagai paradigma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pancasila berfungsi sebagai paradigma utama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila seharusnya menjadi pedoman dan kerangka berpikir dalam semua aspek kehidupan, dengan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan individu atau kelompok. Diharapkan, penerapan nilai-nilai Pancasila dapat menghasilkan perilaku yang mencerminkan kelima sila dalam aktivitas sehari-hari dan memperkuat integrasi nasional. Untuk menciptakan masa depan yang lebih baik, penting untuk terus memperkuat pemahaman dan penerapan Pancasila melalui pendidikan dan pembangunan karakter.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memahami Pancasila sebagai paradigma dalam kehidupan sosial, kebangsaan, dan kenegaraan. Penelitian ini akan menyelidiki bagaimana Pancasila berperan sebagai dasar nilai, kerangka berpikir, dan pedoman perilaku sehari-hari bagi masyarakat Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji kontribusi Pancasila dalam membangun dan menjaga integritas bangsa, serta bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat menjadi pedoman untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik di masa mendatang.

METODE

Penelitian ini disusun menggunakan metode penelitian Library Research, yang melibatkan pengumpulan dan analisis data dari berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, dan dokumen lainnya. Proses penelitian dimulai dengan mengidentifikasi topik yang akan dibahas, kemudian mencari literatur relevan sebagai bahan kajian. Informasi dari sumber-sumber tersebut dianalisis secara kritis dan disintesis untuk mendukung argumen atau menjawab permasalahan yang diangkat. Metode ini sesuai digunakan dalam penelitian konseptual yang berfokus pada studi pustaka sebagai landasan teoritis.

PEMBAHASAN

1. Sejarah Pancasila dan Pengertian Paradigma

Pancasila berasal dari bahasa Sansekerta, di mana "panca" berarti lima dan "sila" berarti prinsip atau asas. Jadi, Pancasila adalah pedoman dan prinsip hidup berbangsa dan bernegara bagi rakyat Indonesia. Pancasila mencakup nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang diikuti dalam kehidupan sehari-hari. Kelima sila tersebut berfungsi sebagai dasar filsafat negara, yang bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang harmonis, adil, dan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila

juga menjadi landasan moral dan etika yang membentuk perilaku serta keputusan politik, sosial, dan budaya dalam menjalankan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat. Sebagai ideologi bangsa, Pancasila terus dijaga dan dikembangkan agar tetap relevan dalam menghadapi berbagai tantangan zaman (Aini Shifana Savitri & Dinie Anggraeni Dewi, 2021, hlm. 167).

Secara historis, gagasan Pancasila sebagai dasar negara berkaitan erat dengan komitmen pemerintah Jepang terhadap kemerdekaan Indonesia. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, keesokan harinya PPKI mengadakan pertemuan untuk melengkapi perangkat negara yang baru merdeka. Pancasila muncul sebagai hasil dari situasi yang mendorong terbentuknya negara Indonesia. Setelah melalui diskusi panjang, para pendiri bangsa akhirnya menyetujui lima prinsip yang kemudian menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara (Mayta Vannesa Putri, t.t.)

Menurut Amir (2013) dalam (Yanzi et al., 2017), Pancasila adalah ideologi bangsa yang harus menjadi inti dari setiap aspek kehidupan dan aktivitas ketatanegaraan, karena Pancasila dianggap sebagai alat untuk menyatukan berbagai pemikiran yang terkait dengan agama, pendidikan, budaya, politik, dan ekonomi masyarakat. Sebagai ideologi negara, Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai budaya dan agama bangsa Indonesia, Pancasila mencakup seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Saribu dkk., 2024, hlm. 76).

Pendapat lain mengatakan bahwa Pancasila merupakan dasar Negara Republik Indonesia yang bermamfaat untuk mengatur kehidupan segala aspek bidang kehidupan bangsa yang di dalamnya juga mengatur tatanan pendidikan di bangsa kita. Pancasila adalah dasar dari pendidikan nasional seperti yang sudah tercantum dalam UU No . 20 tahun 2003 Bab 2 tentang sistem pendidikan nasional, yang berbunyi : pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga, Pancasila bisa dikatakan salah satu dasar terpenting dalam pendidikan nasional di Indonesia. Pancasila adalah "warisan jenius" para pendiri bangsa, Pancasila melambangkan kebenaran dari sejarah sebagai bagian dari proses berbangsa dan bernegara Indonesia (Nabila dkk., 2023, hlm. 2232).

Dari pembahasan di atas dapat kita simpulkan bahwa Pancasila merupakan ideologi dan dasar Negara Republik Indonesia yang memiliki peran fundamental dalam mengatur seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai pedoman yang mengandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, Pancasila berfungsi tidak hanya sebagai dasar filsafat negara, tetapi juga sebagai landasan moral dan etika dalam kehidupan bermasyarakat. Pancasila menjadi alat penyatuan berbagai pemikiran terkait agama, budaya, politik, pendidikan, dan ekonomi. Selain itu, Pancasila juga berperan penting dalam sistem pendidikan nasional, seperti yang diatur dalam UU No. 20 tahun 2003, dan merupakan warisan berharga dari para pendiri bangsa, yang mencerminkan proses sejarah berbangsa dan bernegara Indonesia.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam (Winaro, 2017), paradigma adalah daftar bentuk kata yang menunjukkan konjugasi dan deklinasi, serta model dalam teori ilmu pengetahuan dan kerangka berpikir.

Thomas S. Khun mendefinisikan paradigma sebagai asumsi teoretis umum yang menjadi sumber hukum, metode, dan penerapan dalam ilmu pengetahuan, yang membentuk sifat, ciri, dan karakter ilmu itu sendiri. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, paradigma mencerminkan keyakinan instrumental yang berakar pada nilai-nilai perjuangan setiap warga negara. Pancasila, sebagai dasar bangsa Indonesia yang dirumuskan melalui proses panjang dan pemikiran para pendiri bangsa, menjadi landasan utama pembangunan bangsa di Indonesia (Saribu dkk., 2024, hlm. 76).

Pendapat lain mengatakan bahwa paradigma adalah sekumpulan nilai-nilai yang membentuk cara berpikir seseorang, yang menjadi dasar pandangan mereka terhadap dunia. Hal ini menciptakan gambaran subjektif individu mengenai realitas, yang pada akhirnya mempengaruhi cara mereka merespons dan berinteraksi dengan realitas tersebut (Almahfuz, t.t., hlm. 31).

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa paradigma merupakan kerangka berpikir yang dibentuk oleh sekumpulan nilai, asumsi, dan konsep teoretis yang mempengaruhi cara seseorang memahami dan merespons realitas. Dalam ilmu pengetahuan, paradigma berfungsi sebagai dasar hukum, metode, dan aplikasi yang membentuk karakter ilmu tersebut. Selain itu, dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, paradigma mencerminkan keyakinan yang didasarkan pada nilai-nilai perjuangan dan prinsip dasar, seperti Pancasila, yang menjadi landasan utama pembangunan dan pandangan hidup bangsa Indonesia.

2. Pancasila sebagai Landasan Kehidupan Bermasyarakat

Sila Pancasila saling berhubungan karena merupakan landasan sistem nilai suatu bangsa. Semua nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, sehingga nilai-nilai tersebut saling berkaitan dalam setiap aspek kehidupan bernegara. Pancasila memainkan peran penting dalam membentuk pola hidup masyarakat Indonesia dengan menanamkan nilai-nilai yang mendukung kerukunan, toleransi, dan solidaritas sosial. Berikut adalah beberapa cara Pancasila berperan dalam membentuk pola hidup masyarakat :

a. Mengajarkan Toleransi Beragama

Sila pertama, "Ketuhanan Yang Maha Esa," mengandung makna bahwa setiap individu memiliki hak untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing tanpa pengaruh dari orang lain, serta berkewajiban untuk menaati perintah dan menjauhi larangan agama atau kepercayaannya. Namun, di Indonesia, pemahaman masyarakat terhadap sila ini masih kurang, terlihat dari banyaknya orang yang tidak menjalankan kewajiban beribadah atau melanggar larangan agama atau kepercayaan mereka. Oleh karena itu, nilai-nilai Ketuhanan perlu diintegrasikan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, pendidikan, pekerjaan, maupun masyarakat.

b. Mendorong Solidaritas dan Kemanusiaan

Sila kedua, "Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab," mengandung makna bahwa setiap manusia yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak dan kewajiban yang sama tanpa membedakan agama, ras, atau kelompok. Sila ini mencakup nilai-nilai kemanusiaan seperti kesetaraan, keadilan,

solidaritas, kasih sayang antar sesama, tenggang rasa, dan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Indonesia adalah negara yang sangat menghargai hak asasi manusia, hukum, serta moral. Sila kedua ini diperlukan untuk melawan pelanggaran hak asasi manusia dan kemanusiaan.

c. Memperkuat Persatuan dalam Keberagaman

Sila ketiga, "Persatuan Indonesia," merupakan prinsip ketiga yang menjadi dasar negara Indonesia. Sila ini mengandung nilai dan prinsip hidup berdampingan. Sebagai negara multikultural yang terdiri dari berbagai ras, suku, agama, dan budaya, persatuan dan kesatuan Indonesia harus selalu dijaga agar tidak terjadi perpecahan.

d. Memupuk Sikap Demokratis dan Musyawarah

Sila keempat, "Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan," menekankan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang harus hidup berdampingan dengan sesamanya. Ketika berinteraksi dengan orang lain, biasanya muncul rasa persatuan dan saling menghormati demi tujuan dan kepentingan bersama. Hal ini sejalan dengan pentingnya nilai-nilai kerakyatan dalam Pancasila. Nilai kerakyatan mencerminkan pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat melalui musyawarah dan kesepakatan yang dicapai oleh lembaga perwakilan rakyat. Sila keempat ini mengandung makna bahwa keputusan atau kebijakan yang diambil adalah hasil musyawarah bersama dan dilaksanakan untuk kepentingan negara. Penerapan nilai-nilai sila keempat dapat dilihat dalam proses demokrasi saat pemilu di Indonesia, di mana demokrasi harus dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan demi kepentingan dan kebaikan bersama.

e. Mewujudkan Keadilan Sosial

Sila kelima, "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia," mencerminkan bentuk keadilan yang nyata, sebagaimana diungkapkan dalam Proklamasi Kemerdekaan dan Pembukaan UUD 1945. Keadilan sosial tercapai ketika setiap orang dapat menjalankan hak-haknya dalam kehidupan bersama dengan orang lain. Sila ini menegaskan bahwa seluruh rakyat Indonesia harus hidup dalam keadilan dan kesejahteraan serta menghormati hak-hak orang lain. Namun, banyak terjadi penyimpangan terhadap prinsip ini, seperti kemiskinan, diskriminasi, dan perlakuan yang tidak adil. Contohnya, diskriminasi sering terjadi di rumah sakit, di mana pasien miskin sering diperlakukan dengan kurang hormat dibandingkan pasien kaya yang mendapatkan perlakuan istimewa. Meski ada penyimpangan, pengamalan sila kelima dapat dilihat melalui upaya mengutamakan keadilan dan mendorong kesetaraan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan (Mayta Vannesa Putri, t.t.).

Secara keseluruhan, Pancasila menanamkan nilai-nilai luhur yang memperkuat kerukunan, toleransi, dan solidaritas social, hingga memupuk sikap demokratis melalui musyawarah dalam masyarakat Indonesia. Pancasila juga merupakan landasan sistem nilai bangsa Indonesia yang saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. Selain itu, Pancasila juga berperan dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Meskipun ada penyimpangan dalam penerapannya, seperti

diskriminasi dan ketidakadilan, penguatan nilai-nilai Pancasila tetap diperlukan agar tercipta kehidupan yang adil, sejahtera, dan harmonis bagi seluruh masyarakat.

3. Pancasila sebagai Paradigma Hidup Berbangsa dan Bernegara

Pancasila sebagai Paradigma Hidup Berbangsa dan Bernegara memiliki makna bahwa Pancasila menjadi dasar dan pedoman utama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi rakyat Indonesia. Sebagai falsafah dasar negara, pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar hukum, tetapi juga sebagai landasan nilai dan moral dalam berbagai aspek kehidupan. Berikut beberapa poin yang menjelaskan Pancasila sebagai paradigma hidup berbangsa dan bernegara:

a. Landasan Ideologis Negara

Pancasila sebagai pedoman utama dalam pembentukan dan pelaksanaan kebijakan negara. Pancasila sebagai ideologi negara memiliki nilai-nilai fundamental yang menjadi pijakan dalam setiap aspek kehidupan bernegara, seperti keadilan sosial, persatuan bangsa, kedaulatan rakyat, dan kemanusiaan yang adil dan beradab.

Sebagai landasan ideologis, Pancasila tidak hanya mengatur hubungan antara pemerintah dan rakyat, tetapi juga membentuk kerangka moral dan etika dalam pengambilan kebijakan. Setiap keputusan pemerintah harus didasarkan pada nilai-nilai Pancasila agar sesuai dengan cita-cita nasional, yaitu menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Ini mencakup perlindungan terhadap hak asasi manusia, distribusi kekayaan yang adil, serta upaya mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pancasila juga berperan dalam menjaga stabilitas negara dan menghindarkan pemerintah dari kecenderungan otoritarianisme atau tirani mayoritas. Dengan menjadikan Pancasila sebagai landasan ideologis, setiap kebijakan yang diambil diharapkan mencerminkan kehendak rakyat serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam keragaman. Dengan demikian, Pancasila bukan hanya sekadar konsep ideologis, tetapi juga landasan dinamis yang terus relevan dalam menjaga keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia (Mayta Vannesa Putri, t.t.).

b. Pemersatu Bangsa

Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan keragaman, baik dalam hal agama, ras, suku, maupun adat istiadat. Keberagaman ini menjadikan Pancasila sebagai landasan yang mampu mempersatukan bangsa melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

Menurut Effendi dalam Taniredja (2014), sejarah pelaksanaan sistem ketatanegaraan di Indonesia telah menunjukkan bahwa Pancasila mampu menyelesaikan perbedaan pendapat dan konflik antar golongan atau daerah. Perbedaan atau konflik sebesar apapun yang muncul pada akhirnya dapat diselesaikan ketika dikembalikan pada nilai-nilai yang terkandung dalam falsafah Pancasila.

Bhineka Tunggal Ika memiliki hubungan yang erat dengan Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa. Sebagai semboyan negara yang dibanggakan, Bhineka Tunggal Ika tercermin dalam lambang Garuda Pancasila. Bhineka Tunggal Ika ini berasal dari bahasa Jawa kuno yang diperkenalkan oleh Mpu

Tantular dalam Kitab Sutasoma, yang bermakna "berbeda-beda tetapi tetap satu". Baik Bhineka Tunggal Ika maupun Pancasila memiliki tujuan yang sama, yaitu mempersatukan bangsa Indonesia, menjaga persatuan, mengurangi konflik kepentingan individu atau kelompok, dan mewujudkan cita-cita negara Indonesia.

Selain itu, bunyi sila ketiga Pancasila, "Persatuan Indonesia," menekankan pentingnya persatuan bangsa. Ini menunjukkan bahwa Pancasila berperan sebagai alat pemersatu bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ketiga mengakui adanya beragam perbedaan di Indonesia, termasuk bahasa, suku, budaya, politik, dan agama. Hal ini mencerminkan bahwa para pemimpin bangsa, khususnya mereka yang terlibat dalam merumuskan dasar negara, memahami dan menghormati perbedaan yang ada di dalam masyarakat Indonesia. Para pemimpin bangsa tentu menyadari bahwa perbedaan memiliki potensi untuk memicu perpecahan. Oleh karena itu, mereka memahami betapa pentingnya persatuan bagi Indonesia. Pencantuman sila ketiga dalam Pancasila bukan hanya menegaskan pentingnya persatuan untuk kelangsungan hidup bangsa, tetapi juga menunjukkan bahwa perbedaan adalah kenyataan yang tidak bisa dihapuskan oleh manusia.

Perbedaan sesungguhnya adalah sebuah anugerah dan bukan sesuatu yang harus diingkari apalagi harus dihilangkan di dunia ini terutama perbedaan pada bangsa Indonesia. Perbedaan ini bersifat alami dan ada di mana pun, di negara mana pun, dan di bangsa mana pun. Untuk menghadapi kenyataan ini, solusinya adalah dengan menjadikan perbedaan sebagai kekayaan yang harus dihargai, sambil mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi, kelompok, atau daerah. Dengan kesadaran ini, jelas bahwa persatuan bangsa merupakan nilai luhur yang harus dijunjung tinggi oleh seluruh umat manusia, karena pada dasarnya, perpecahan atau konflik justru akan merusak kemanusiaan itu sendiri (Siahaan dkk., 2022).

c. Sumber Nilai dalam Kehidupan Sosial

Pancasila menjadi sumber nilai utama yang mengatur kehidupan sosial masyarakat. Nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan gotong royong yang terkandung dalam Pancasila diharapkan dapat dihayati dan diamalkan oleh setiap warga negara. Dalam kehidupan sosial, penerapan nilai-nilai ini terlihat dalam hubungan antarindividu yang saling menghormati dan peduli. Kerja sama di antara warga masyarakat dalam kegiatan seperti tolong-menolong, musyawarah, dan pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama menjadi cerminan konkret dari nilai-nilai Pancasila. Hal ini menciptakan lingkungan sosial yang harmonis dan memperkuat persatuan bangsa.

Menurut Nurgiansah (2021b), nilai memiliki beberapa fungsi, antara lain sebagai pembentuk pola pikir dan perilaku ideal dalam masyarakat. Nilai dapat menumbuhkan semangat pada individu untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selain itu, nilai juga berperan sebagai alat pengawasan terhadap perilaku seseorang dalam masyarakat. Nilai mampu mendorong, membimbing, dan menekan individu untuk melakukan perbuatan baik, serta berfungsi sebagai alat solidaritas di antara anggota masyarakat (Sianturi & Dewi, 2021, hlm. 223).

Nilai-nilai Pancasila, seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kemasyarakatan, dan keadilan, merupakan hal yang perlu diterapkan melalui pendidikan karakter. Hal ini bertujuan agar bangsa Indonesia tumbuh menjadi manusia yang taat beragama, menghargai kemanusiaan, bersikap adil, serta bermanfaat bagi diri sendiri, orang lain, bangsa, dan negara. Pendidikan budaya dan karakter bangsa bertujuan untuk mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang lebih baik, yakni warga negara yang memiliki kemampuan, kemauan, serta menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-harinya sebagai anggota masyarakat. Untuk membentuk generasi bangsa yang bermoral dan berkualitas, diperlukan beberapa proses. Salah satu caranya adalah dengan membekali mereka dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila, karena Pancasila merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam menjalani kehidupannya. Generasi muda harus memahami, dan menerapkan seluruh nilai-nilai Pancasila, karena nilai-nilai tersebut dapat menjadi fondasi dan pelindung dari pengaruh-pengaruh negatif yang dapat merusak moral mereka. Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter, perilaku yang menyimpang akan dapat diperbaiki, dan individu yang memiliki karakter serta jiwa nasionalis dan patriotis tidak akan melakukan penyimpangan (Sianturi & Dewi, 2021, hlm. 229).

Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang sosial budaya berkaitan dengan perkembangan sistem nilai sosial dan budaya di masyarakat. Hal ini menuntut kita untuk selalu sadar dan memastikan agar nilai-nilai sosial dan budaya yang berkembang tetap selaras dengan Pancasila. Contoh nilai sosial yang sesuai dengan Pancasila adalah musyawarah dan gotong royong. Kedua nilai ini perlu dijaga di tengah perubahan nilai sosial di masyarakat. Selain dijaga, nilai-nilai ini juga harus diajarkan dan diwariskan kepada generasi muda agar tidak hilang. Selain itu, budaya di setiap daerah juga perlu dilestarikan, tidak hanya untuk menjaga kebudayaan, tetapi juga untuk mencegah masuknya budaya yang bertentangan dengan Pancasila. Kita juga harus mampu menghargai budaya, ras, dan kepercayaan orang lain serta menghindari segala bentuk diskriminasi. Nilai-nilai Pancasila memiliki karakteristik yang dapat diterima dan diakui oleh semua negara, karena bersifat universal dan objektif. Pancasila mampu membimbing masyarakat untuk berperilaku baik dan menuju kemajuan. Namun, Pancasila tidak akan berfungsi tanpa adanya penggerak, karena pada dasarnya Pancasila hanyalah konsep pemikiran yang tidak dapat bergerak sendiri tanpa peran manusia sebagai penggeraknya (Firdasari dkk., 2022, hlm. 5).

d. Panduan dalam Sistem Hukum dan Pemerintahan

Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum, sehingga semua aspek kehidupan bernegara harus selalu didasarkan pada hukum positif. Setiap aktivitas yang dilakukan dalam kehidupan bernegara hanya bisa dijalankan jika ada dasar hukum yang mengaturnya. Dalam hal ini, hukum berfungsi sebagai penyaring yang harus dilewati oleh konsep dan sistem agar bisa diterapkan atau diwujudkan. Di sinilah pentingnya peran Pancasila dalam pembangunan hukum di Indonesia. Setiap aturan yang akan dijadikan hukum positif harus terlebih dahulu disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila. Kelima sila Pancasila menjadi tolok ukur dalam pembentukan aturan yang bersifat hierarkis, di mana aturan yang lebih rendah

tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Ini berarti bahwa substansi dari produk hukum harus bersifat responsif, yaitu untuk kepentingan rakyat dan sebagai perwujudan aspirasi mereka.

Farida (2016), Pancasila sebagai Norma atau Kaidah Dasar (Grundnorm) bagi Negara Indonesia secara otomatis menjadi sumber hukum material, atau sumber isi hukum, yang mencakup hukum tertulis seperti peraturan perundang-undangan di Indonesia, mulai dari tingkat tertinggi hingga terendah. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, secara umum terdapat enam jenis atau bentuk peraturan, yaitu: (1) Undang-Undang Dasar, (2) Undang-undang, (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu), (4) Peraturan Pemerintah, (5) Peraturan Presiden, dan (6) Peraturan Daerah. Keenam jenis atau bentuk peraturan ini kemudian dirangkum dalam lima tingkatan hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu: (1) Undang-Undang Dasar, (2) Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, (3) Peraturan Pemerintah, (4) Peraturan Presiden, dan (5) Peraturan Daerah (Mogi & Salsabilla, 2022, hlm. 33).

e. Mewujudkan Keadilan Social

Thomas W. Simon menyatakan bahwa para ahli teori memiliki definisi yang beragam tentang keadilan (justice). Kaum libertarian mendefinisikan keadilan sebagai kebebasan (liberty), sementara kaum sosialis mendefinisikannya sebagai kesetaraan. Kelompok liberal menggabungkan kebebasan dan kesetaraan dalam definisi mereka, sedangkan kaum komunitarian memandang keadilan sebagai kebaikan umum (common good).

Pendapat lain mengatakan Hans Kelsen, seorang penganut mazhab Analytical Jurisprudence, seperti yang dijelaskan oleh Andi Ryza Fardiansyah, menyatakan bahwa keadilan sebagai kesetaraan dapat diartikan sebagai upaya menciptakan kebahagiaan umum, yaitu terciptanya suatu kondisi sosial di mana setiap orang merasakan kepuasan dan kebahagiaan secara kolektif. Menurutnya, keadilan merupakan konsep yang sangat subjektif, dan ia memandang keadilan sebagai sesuatu yang erat kaitannya dengan kebahagiaan umum. Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku di masyarakat dalam semua aspek kehidupan, baik secara materiil maupun spiritual. Ini menunjukkan bahwa keadilan tersebut tidak hanya berlaku bagi kalangan kaya, tetapi juga bagi yang miskin, dan bukan hanya untuk pejabat, melainkan juga untuk rakyat biasa. Dengan kata lain, keadilan sosial berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia, baik yang tinggal di wilayah Republik Indonesia maupun warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Konsep keadilan sosial mencakup seluruh dimensi dan aspek kemanusiaan terkait keadilan. Istilah ini erat kaitannya dengan pembentukan struktur kehidupan masyarakat yang berlandaskan pada prinsip kesetaraan (equality) dan solidaritas. Dalam konsep ini terkandung pengakuan atas martabat manusia, di mana setiap individu memiliki hak asasi yang sama dalam hubungan antarpribadi, baik dalam aspek materiil maupun spiritual (Purwanto, 2020).

4. Tantangan Pancasila dalam Kehidupan Modern

Pancasila menghadapi berbagai tantangan yang mengancam keberadaannya serta penerapannya, tantangan-tantangan tersebut meliputi:

a. Tantangan Globalisasi

Globalisasi adalah proses integrasi dunia di berbagai aspek seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan informasi. Globalisasi membawa dampak baik dan buruk bagi Indonesia. Dampak positifnya mencakup kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kerja sama internasional, pertukaran budaya, serta peluang pasar. Namun, dampak negatifnya termasuk persaingan ketat, dominasi negara maju, penyebaran ideologi asing, degradasi moral, serta hilangnya identitas nasional. Untuk mengatasi tantangan ini, Indonesia harus mampu memanfaatkan peluang dan mengatasi hambatan dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Indonesia perlu bersaing secara sehat dan mandiri di dunia internasional tanpa kehilangan jati diri dan kedaulatan. Selain itu, menjaga kerukunan dan toleransi antar warga dengan latar belakang yang beragam menjadi penting, sambil mengutamakan persatuan dan semangat kemanusiaan.

b. Tantangan Radikalisme

Radikalisme adalah paham atau gerakan yang menginginkan perubahan drastis dengan menggunakan kekerasan terhadap sistem yang ada. Radikalisme dapat muncul dalam berbagai bidang, seperti agama, politik, sosial, dan budaya. Radikalisme bisa mengancam keutuhan dan keamanan Indonesia dengan memicu konflik, terorisme, separatisme, diskriminasi, intoleransi, serta anarkisme. Dalam menghadapi radikalisme, Indonesia harus menegakkan nilai-nilai Pancasila yang inklusif, moderat, demokratis, dan humanis. Indonesia perlu menolak segala bentuk radikalisme yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam menjaga supremasi hukum dan konstitusi sebagai fondasi negara.

c. Tantangan Korupsi

Korupsi adalah pelanggaran hukum yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang memanfaatkan jabatan untuk memperkaya diri atau orang lain dengan merugikan kepentingan umum. Korupsi merusak tatanan sosial dan ekonomi Indonesia, serta dapat menyebabkan kemiskinan, ketimpangan, ketidakadilan, ketidakpercayaan, krisis moral, dan krisis kepemimpinan. Untuk mengatasi korupsi, Indonesia harus menerapkan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman etika dalam kehidupan sehari-hari. Indonesia harus menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, transparansi, akuntabilitas, serta tanggung jawab dalam menjalankan tugas sebagai warga negara. Selain itu, memberantas korupsi secara tegas dan sistematis dengan melibatkan semua elemen masyarakat dan penegak hukum juga penting (*Blog UI An Nur Lampung – Home, t.t.*).

KESIMPULAN

Pancasila, sebagai ideologi dan dasar negara Indonesia, berperan sangat penting dalam menjaga keanekaragaman dan persatuan bangsa. Sebagai landasan moral dan etika, Pancasila tidak hanya menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, tetapi juga sebagai kerangka berpikir dalam menjalankan pemerintahan dan kebijakan negara. Setiap nilai yang terkandung dalam Pancasila, seperti ketuhanan,

kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial, berperan dalam memperkuat integrasi nasional, mendorong kerukunan, toleransi, serta solidaritas sosial. Meskipun Pancasila telah menjadi fondasi negara, tantangan seperti globalisasi, radikalisme, dan korupsi tetap menguji penerapannya di kehidupan modern. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, Pancasila perlu terus dijaga, diterapkan, dan diajarkan kepada generasi muda sebagai landasan hidup yang dapat membentuk masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini Shifana Savitri & Dinie Anggraeni Dewi. (2021). Implementasi Nilai—Nilai Pancasila dalam Kehidupan di Era Globalisasi. *INVENTA*, 5(2), 165–176. <https://doi.org/10.36456/inventa.5.2.a3549>
- Almahfuz. (t.t.). Pancasila sebagai paradigma dalam kehidupan antarumat beragama di Indonesia. *Teraju*.
Blog UI An Nur Lampung – Home. (t.t.). Diambil 14 Oktober 2024, dari <https://an-nur.ac.id/blog/>
- Firdasari, A., Savitri, A. A., Ningsih, A. H., & Fitrono, R. A. (2022). *IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM KEHIDUPAN SOSIAL BUDAYA*. 4(3).
- Mayta Vannesa Putri, P. (t.t.). *Perwujudan Nilai-Nilai Sila Pancasila Sebagai Fondasi Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara*. <https://www.researchgate.net/publication/379652454>
- Mogi, A. J., & Salsabilla, A. F. (2022). *Pancasila Sebagai Pedoman Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*. 1(2).
- Purwanto, P. (2020). PERWUJUDAN KEADILAN DAN KEADILAN SOSIAL DALAM NEGARA HUKUM INDONESIA: Perjuangan yang Tidak Mudah Dioperasionalkan. *JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI*, 1(1). <https://doi.org/10.32501/jhmb.v1i1.2>
- Saribu, T. W. D., Harahap, S. N., Sitorus, M., & Usiono, U. (2024). Pancasila Sebagai Paradigma Dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara. *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary*, 2(1), 73–78. <https://doi.org/10.57235/jerumi.v2i1.1580>
- Siahaan, J., Agustina, R., Jonandes, R., & Fitrono, R. A. (2022). Pancasila sebagai Alat Pemersatu Bangsa Indonesia. *Gema Keadilan*, 9(3). <https://doi.org/10.14710/gk.2022.16520>
- Sianturi, Y. R. U., & Dewi, D. A. (2021). PENERAPAN NILAI NILAI PANCASILA DALAM KEHIDUPAN SEHARI HARI DAN SEBAGAI PENDIDIKAN KARAKTER. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(1), 222–231. <https://doi.org/10.31316/jk.v5i1.1452>